



**P E N E T A P A N**

Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ikbal Pelurui bin Abd. Hakim**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kokini Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

**Yuliana Mangadilan binti Linus M**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kokini Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi tanggal 10 Agustus 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Yadin A.M dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama bernama Sirwan Lajati dan Nukri Madolan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai satu anak bernama Al Fadly Pelurui, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 di Desa Kokini Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Itsbath Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu menikah di Desa Kokini dan Pemohon II telah masuk agama Islam 2 hari sebelum pernikahan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini bernama Yadin Mau;
- Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Yadin A.M karena ayah kandung Pemohon II beda agama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotocopy KTP Pemohon I dengan NIK 7207020709930001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan (bukti P.1);
2. Fotocopy KTP Pemohon II dengan NIK 7207145309940001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan (bukti P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. **Sirwan Lajati**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal tanggal 05 Juli 2012, yang dilaksanakan di Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, tepatnya di rumah kakek Pemohon I, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim (Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini), karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Katolik dan orang tua Pemohon II tersebut merestuinnya dan hadir dipernikahan, dan Imam Masjid Mujahidin tersebut bernama Yadin Mau;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai saudara yang beragama Islam saudara laki-laki Pemohon II adalah penganut agama Kristen Katolik;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ada petugas dari Kantor Urusan Agama (PPN) setempat;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, dan pernikahan tersebut dihadiri ± 50 orang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I beragama Islam dan sudah dewasa, dan Pemohon II juga beragama Islam karena dua hari sebelum pernikahan tersebut, Pemohon II telah masuk agama Islam (Muallaf) dan juga telah dewasa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sepersusuan dan juga tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat seperti Akta Kelahiran anak;

**2. Nukri Madolan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman dari Pemohon II dari garis keturunan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Juli 2012, yang dilaksanakan di Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, tepatnya di rumah kakek Pemohon I, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim (Imam Masjid Desa Kokini) bernama Yadin Mau, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Katolik dan orang tua Pemohon II tersebut merestuinnya, dan hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II mempunyai saudara kandung laki-laki, namun saudara kandung Pemohon II tersebut penganut agama Kristen Katolik;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ada petugas dari Kantor Urusan Agama (PPN) setempat yang menyaksikan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kami yang menjadi saksi nikah, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh sanak kerabat ± 50 orang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I beragama Islam dan telah berumur 19 tahun, dan Pemohon II juga beragama Islam karena dua hari sebelum

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Pemohon II telah masuk agama Islam (Muallaf) dan juga telah berumur 18 tahun; Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sepersusuan dan juga tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat seperti Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan itsbat nikah dan masuk dalam bidang perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hal. 6 dari 14* Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, yang mana alamat dan domisili Pemohon I dan Pemohon II masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama jangka waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 05 Juli 2012 di Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Yadin Mau (Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini), karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Katolik, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Sirwan Lajati dan Nukri Madolan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya keduanya mohon dinyatakan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

*Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berseduaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini; Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, yakni di rumah kakek Pemohon I;
- Bahwa saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup namun menganut agama Kristen Katolik, saudara kandung Pemohon II juga beragama Kristen Katolik, paman Pemohon II dari jalur ayah Pemohon II juga menganut agama Kristen Katolik dan Pemohon II, sehingga Pemohon II tidak mempunyai wali nasab, namun kedua orang-tua Pemohon II telah merestuinnya dan hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama Islam dalam hal ini Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini ditunjuk oleh Pemohon II sebagai walinya, yang mana Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini tersebut telah banyak menikahkan orang di daerah tersebut;
- Bahwa ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri ± 50 orang dari sanak keluarga dan tetangga, dan diantaranya adalah dua orang saksi nikah bernama **Sirwan Lajati** dan **Nukri Madolan**;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, beragama Islam, dan telah dewasa berumur 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus

*Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, dua hari sebelum menikah Pemohon II telah beragama Islam (Muallaf), dan telah dewasa berumur 18 tahun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pemikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Al Fadly;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN) setempat, dan mereka mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai berikut :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح  
على غير ذلك فهو باطل

Artinya : " Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal ";

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A, yang berbunyi sebagai berikut:

السُّطَّانُ وَلِيْمَنَا وَلِيْلَهٗ

Artinya: " Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang (Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini), bukan

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua urusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti (Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini);
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaaj Li Syarh al-Minhaaj, Juz 20, Hal. 308, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut :

لَوَلَّمِيكُنَّهَا وَلِيْقَالَ بَعْضُهُمَا صَلًّا ، وَقَالَ بَعْضُهُم مِمَّا كُنَّا تَوَجُّهًا ،  
جَازِلَهَا أَنْ تَقَوْضَ مَعْ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مَجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَزُوجَهَا  
مِنْهَا لَنْهُمْ كَمُّهُ وَكَأَلْحَاكِمٍ ، وَكَذَا لَوْ لَتَمَّعَهُ عَدْلًا صَحْلَى  
الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا  
يَخْتَصِدُّ لِكَيْفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعُوجِدُهُ سَفَرًا ، أَوْ حَضَرَ

Artinya : " Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila: 1). Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya, 2). Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini, bernama Yadin Mau, oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendapatkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ikbal Pelurui bin Abd. Hakim) dengan Pemohon II (Yuliana Mangadilan binti Linus M) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 di Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

*Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah

## Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |            |                 |
|----------------------|---|------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.        | 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | ,-              |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 5.000,-         |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp.        | 6.000,-         |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp.</b> | <b>91.000,-</b> |

Terbilang: *sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)